

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori Dasar

1. Program Rehabilitas Sosial

a. Pengertian Program Rehabilitas sosial

Program Rehabilitas sosial merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial individu, keluarga, atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial sehingga dapat hidup mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. Menurut (Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2023), rehabilitas sosial adalah serangkaian layanan sosial yang diberikan secara sistematis untuk membantu penerima manfaat mengatasi disfungsi sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka, baik dari segi sosial, psikologis, maupun ekonomi.

Secara konseptual, rehabilitasi sosial menekankan pada pemberian bantuan yang bersifat holistik dan berkelanjutan, tidak hanya dalam bentuk bantuan materi, tetapi juga melalui pendampingan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan psikososial. Pendekatan ini dirancang agar penerima manfaat tidak hanya terbantu secara finansial dalam jangka pendek, tetapi juga mampu mengembangkan

kapasitas diri untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di masa mendatang (Suharto, 2016).

Dalam praktiknya, program rehabilitasi sosial mencakup berbagai kegiatan yang bersifat komprehensif. Misalnya, bagi keluarga miskin, program ini dapat berupa pendampingan keluarga, pelatihan usaha mikro, pemberian bantuan modal usaha, peningkatan keterampilan produktif, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Bagi individu yang mengalami gangguan sosial, kegiatan rehabilitasi sosial dapat berupa konseling psikososial, pelatihan sosial, atau penguatan kapasitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Semua kegiatan ini dirancang untuk membentuk kemandirian sosial dan ekonomi, sehingga penerima manfaat dapat keluar dari kondisi ketergantungan pada bantuan sosial secara bertahap (Nugroho, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memulihkan fungsi sosial masyarakat yang mengalami keterbatasan atau berada dalam kondisi rentan. Dengan kata lain, rehabilitasi sosial bukan sekadar bantuan tambahan atau opsional, tetapi merupakan hak konstitusional masyarakat miskin untuk memperoleh

kesempatan hidup yang layak, partisipasi sosial, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi diri (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Program rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang dapat menjadi pemicu kemiskinan jangka panjang. Dengan memberikan pendampingan dan pemberdayaan, program ini membantu masyarakat miskin mengembangkan kapasitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan kemampuan adaptasi mereka terhadap perubahan sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembangunan berbasis manusia, yang menekankan pentingnya kemampuan individu untuk bebas berpartisipasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Sen, 1999).

Dalam konteks desa seperti Desa Jeranglah Tinggi, Kabupaten Bengkulu Selatan, program rehabilitasi sosial menjadi sangat relevan karena sebagian besar masyarakat hidup dalam kondisi rentan, dengan pendapatan tidak tetap, keterbatasan keterampilan, dan akses terbatas terhadap layanan publik. Implementasi program rehabilitasi sosial di desa ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian

ekonomi, memperkuat fungsi sosial keluarga, serta membantu masyarakat miskin keluar dari lingkaran kemiskinan multidimensional yang mereka hadapi (Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024).

Dengan demikian, program rehabilitasi sosial memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan sosial, bukan hanya sekadar bantuan sementara. Program ini tidak hanya memberikan manfaat material, tetapi juga membangun kapasitas sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat, sehingga mampu menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada proses implementasi, partisipasi masyarakat, serta dukungan lintas lembaga, sehingga tujuan jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin dapat tercapai (Suharto, 2016).

Dapat di simpulkan bahwa Program rehabilitasi sosial merupakan upaya terpadu untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan sosial dan ekonomi agar dapat pulih dan berfungsi secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat. Program ini tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menekankan pada pemberdayaan, pendampingan, pelatihan keterampilan, dan penguatan kapasitas

individu maupun keluarga. Dengan pendekatan yang komprehensif, rehabilitasi sosial bertujuan meningkatkan kemandirian, memperbaiki kualitas hidup, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial. Keberhasilan program sangat bergantung pada implementasi yang tepat, partisipasi aktif masyarakat, dan koordinasi antar lembaga, sehingga tujuan jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan dan fungsi sosial masyarakat dapat tercapai.

b. Dasar Hukum Program Rehabilitas sosial

Program rehabilitasi sosial merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Pelaksanaan program ini memiliki dasar hukum yang jelas, baik secara nasional maupun internasional, yang memberikan legitimasi dan panduan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam melaksanakan rehabilitasi sosial.

Secara nasional, dasar hukum utama program rehabilitasi sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. UU ini menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi dan memulihkan fungsi sosial masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu, rentan

miskin, atau mengalami gangguan sosial. Pasal 7 UU ini secara spesifik menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan sosial yang harus diberikan kepada masyarakat untuk memulihkan fungsi sosial, meningkatkan kemandirian, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Selain itu, pemerintah Indonesia juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang mengatur mekanisme pelaksanaan rehabilitasi sosial secara teknis, termasuk pendampingan, pemberian bantuan, pelatihan keterampilan, dan monitoring program. Peraturan ini menjabarkan bagaimana rehabilitasi sosial dijalankan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, serta menekankan koordinasi antar lembaga agar program berjalan efektif dan tepat sasaran (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Program rehabilitasi sosial juga dilandasi oleh berbagai peraturan menteri sosial, yang memberikan pedoman operasional bagi pendamping sosial dan pelaksana program di lapangan. Misalnya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Sosial mengatur tata cara pendampingan keluarga miskin, pelaksanaan pelatihan

keterampilan, dan prosedur pemberian bantuan sosial secara profesional dan transparan. Regulasi ini menjadi rujukan teknis yang penting agar tujuan rehabilitasi sosial dapat tercapai sesuai standar pelayanan minimal (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).

Secara internasional, program rehabilitasi sosial sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan Deklarasi PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini memperkuat legitimasi program rehabilitasi sosial sebagai kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dan rentan (*United Nations*, 1948).

Dengan demikian, dasar hukum program rehabilitasi sosial dapat dilihat dari tiga aspek utama: pertama, UU dan peraturan pemerintah yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam pemulihan fungsi sosial masyarakat; kedua, peraturan teknis atau peraturan menteri sosial yang memberikan pedoman operasional; dan ketiga, prinsip hak asasi manusia yang mendasari tujuan program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata. Legalitas ini menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan rehabilitasi

sosial, sehingga program dapat diterapkan secara sah, terarah, dan akuntabel di berbagai wilayah, termasuk di desa-desa seperti Desa Jeranglah Tinggi, Kabupaten Bengkulu Selatan.

c. Bentuk-bentuk Program Rehabilitasi Sosial

Bentuk-bentuk program rehabilitasi sosial pada dasarnya disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program dapat dilakukan melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan sosial, peningkatan keterampilan, dan penguatan kemandirian. Menurut Suharto (2014), upaya peningkatan kesejahteraan sosial perlu diarahkan pada pemberian pelayanan dan pemberdayaan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya.

Tabel 2.1
Bentuk-bentuk Program Rehabilitasi sosial

No.	Bentuk Program	Contoh Pelaksanaan
1	Bantuan social	BLT, PKH, BPNT
2	Pemberdayaan ekonomi	Bantuan modal dan pengembangan usaha
3	Pemenuhan kebutuhan dasar	Pangan dan kebutuhan sehari-hari
4	Pendampingan social	Pendampingan dan pemantauan penerima
5	Peningkatan	Mendorong usaha dan peningkatan

No.	Bentuk Program	Contoh Pelaksanaan
	kemandirian	pendapatan

Sumber Data : Data Desa dan SDGS

1. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, maupun pelayanan sosial. Bantuan tersebut bertujuan mengurangi beban masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks penelitian ini, bantuan sosial yang berkaitan dengan masyarakat penerima program antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program bantuan sosial tersebut pada dasarnya diarahkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Pemberdayaan Ekonomi

Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, maupun pelayanan sosial. Bantuan tersebut bertujuan mengurangi beban

masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks penelitian ini, bantuan sosial yang berkaitan dengan masyarakat penerima program antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Program bantuan sosial tersebut pada dasarnya diarahkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Menurut Suharto (2014), kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan kemampuan individu dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjalankan fungsi sosialnya. Kebutuhan dasar tersebut antara lain pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

4. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan proses pemberian dukungan kepada masyarakat agar mampu mengakses, menerima, dan memanfaatkan program yang diberikan. Pendampingan dapat dilakukan melalui pemberian informasi, konsultasi, motivasi,

pemantauan, serta membantu masyarakat mengatasi hambatan dalam memperoleh pelayanan sosial. Menurut Suharto (2014), pendampingan merupakan bagian penting dalam proses pemberdayaan karena masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi juga membutuhkan dukungan agar mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

5. Peningkatan Keterampilan

Peningkatan keterampilan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan dalam kehidupan maupun kegiatan ekonomi. Peningkatan keterampilan dapat dilakukan melalui pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan, maupun pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi masyarakat. Menurut Suharto (2014), peningkatan kapasitas merupakan bagian dari pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

6. Penguatan Kemandirian

Penguatan kemandirian merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengoptimalkan

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Menurut Suharto (2014), pemberdayaan pada akhirnya diarahkan agar masyarakat memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, mengambil keputusan, serta menyelesaikan masalah yang dihadapi secara lebih mandiri.

d. Tujuan Program Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial dirancang sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami keterbatasan sosial maupun ekonomi. Tujuan utama program ini adalah memulihkan fungsi sosial individu, keluarga, dan kelompok masyarakat agar dapat hidup mandiri, produktif, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial. Tujuan program tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, sosial, dan kemampuan adaptasi masyarakat.

1. Memulihkan Fungsi Sosial

Salah satu tujuan utama program rehabilitasi sosial adalah membantu penerima manfaat untuk memulihkan fungsi sosialnya. Hal ini mencakup kemampuan individu atau keluarga untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sosial dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan pemulihan fungsi sosial, masyarakat miskin atau rentan sosial

dapat lebih mudah berinteraksi, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial dan ekonomi di lingkungannya (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

2. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

Program ini juga bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, pemberian modal, dan pengembangan kapasitas, penerima manfaat diharapkan mampu memperoleh penghasilan yang cukup, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, serta menciptakan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan ini menjadi kunci dalam mengurangi kemiskinan struktural di masyarakat (Suharto, 2016).

3. Mengurangi Ketergantungan pada Bantuan Sosial

Rehabilitasi sosial bukan sekadar memberikan bantuan materiil, tetapi menekankan pada pemberdayaan. Dengan pendampingan, pelatihan, dan bimbingan sosial, masyarakat dapat belajar mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga ketergantungan terhadap bantuan sosial jangka panjang dapat berkurang. Hal ini juga

membantu pemerintah mengalokasikan bantuan secara lebih tepat sasaran (Nuhdin, 2024).

4. Meningkatkan Akses terhadap Layanan Dasar

Program rehabilitasi sosial bertujuan membantu masyarakat miskin memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial lainnya. Pendampingan sosial dan penyuluhan yang diberikan membantu warga memahami hak-hak mereka serta memanfaatkan fasilitas publik secara optimal, sehingga kualitas hidup mereka meningkat secara menyeluruh (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024).

5. Memberdayakan Masyarakat

Tujuan lain dari rehabilitasi sosial adalah pemberdayaan masyarakat. Program ini mendorong masyarakat untuk mengorganisasi diri dalam kelompok, mengembangkan usaha bersama, serta aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga pelaku perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan kolektif di lingkungan mereka (Zastrow, 2017).

Dengan demikian, tujuan program rehabilitasi sosial bersifat holistik dan multidimensional. Program

ini tidak hanya menitikberatkan pada bantuan materiil, tetapi lebih menekankan pada penguatan kapasitas, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas sosial-ekonomi masyarakat. Tujuan-tujuan ini sejalan dengan mandat pemerintah dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 dan berbagai peraturan teknis terkait, sehingga pelaksanaan rehabilitasi sosial dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat.

e. Langkah-langkah Program Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial memerlukan proses yang sistematis agar tujuan program dapat tercapai secara efektif. Langkah-langkah yang ditempuh mencakup identifikasi penerima manfaat, perencanaan intervensi, pelaksanaan program, pendampingan, hingga evaluasi hasil. Setiap tahapan dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pendamping sosial di lapangan.

1. Identifikasi dan Pendataan Penerima Manfaat

Langkah awal dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial adalah mengidentifikasi dan mendata keluarga atau individu yang membutuhkan intervensi sosial. Data biasanya dikumpulkan melalui *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* dan sumber lokal lain, seperti laporan dari kepala

desa atau RT/RW. Identifikasi ini bertujuan memastikan program tepat sasaran dan penerima manfaat benar-benar termasuk kategori rentan sosial maupun ekonomi (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

2. Perencanaan Intervensi

Setelah penerima manfaat teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah menyusun rencana intervensi sosial yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, keluarga, atau kelompok. Perencanaan ini meliputi penentuan jenis layanan, jadwal pelaksanaan, pendampingan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan program, karena intervensi yang tepat dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi sosial (Suharto, 2016).

3. Pelaksanaan Program

Pada tahap ini, intervensi sosial dijalankan sesuai rencana. Bentuk pelaksanaan dapat berupa pemberian bantuan materiil, pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, konseling, atau pengembangan usaha produktif. Pelaksanaan dilakukan oleh pendamping sosial bersama instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan pemerintah desa, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan

pengawasan agar program berjalan lancar (Nuhdin, 2024).

4. Pendampingan dan Pembinaan

Pendampingan merupakan langkah penting agar penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu memanfaatkan program untuk meningkatkan kemandirian. Pendampingan dapat berupa bimbingan teknis, konseling psikososial, pelatihan pengelolaan usaha, serta pemantauan perkembangan penerima manfaat. Langkah ini membantu mengidentifikasi kendala yang dihadapi warga dan memberikan solusi secara langsung (Zastrow, 2017).

5. Monitoring dan Evaluasi

Tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan program. Monitoring dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah intervensi telah dijalankan sesuai rencana dan apakah dampak program mulai terlihat. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang rehabilitasi sosial. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan program, perencanaan kebijakan lanjutan, serta pengambilan keputusan

strategis bagi pemerintah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024).

6. Pelaporan dan Dokumentasi

Seluruh kegiatan program direkam dan dilaporkan secara sistematis agar dapat menjadi bahan pertanggungjawaban kepada instansi terkait dan publik. Dokumentasi ini juga berguna untuk menyebarkan praktik terbaik (*best practice*) dan pengalaman lapangan yang dapat diterapkan di wilayah lain dengan kondisi serupa.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, program rehabilitasi sosial dapat berjalan secara sistematis, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi penerima manfaat. Pendekatan terstruktur ini penting agar intervensi sosial tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata dalam peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020)

f. Implementasi Program Rehabilitas Sosial

Implementasi program rehabilitasi sosial merupakan tahap kritis dalam siklus kebijakan sosial, karena pada tahap inilah tujuan program diwujudkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Keberhasilan implementasi menentukan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan

rentan sosial. Implementasi program ini mencakup proses perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

1. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait

Implementasi program rehabilitasi sosial dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. Di tingkat desa, kantor desa berperan dalam pendataan keluarga miskin, pengelolaan administrasi program, serta koordinasi dengan pendamping sosial. Kecamatan bertugas sebagai pengawas dan koordinator antara desa dan Dinas Sosial Kabupaten untuk memastikan program berjalan sesuai regulasi dan target (Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024).

2. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Tahap ini meliputi identifikasi penerima manfaat, analisis kebutuhan, dan penyusunan rencana kegiatan sesuai kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Perencanaan dilakukan secara partisipatif, melibatkan pendamping sosial, aparat desa, dan tokoh masyarakat, agar intervensi yang diberikan tepat sasaran. Kegiatan perencanaan ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan

implementasi program (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

3. Pelaksanaan Program

Pada tahap pelaksanaan, berbagai kegiatan rehabilitasi sosial dijalankan, antara lain:

- a) Pendampingan sosial bagi individu dan keluarga miskin.
- b) Pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha produktif.
- c) Pemberian bantuan modal, alat produksi, atau fasilitas pendukung.
- d) Konseling psikososial dan pembinaan fungsi sosial keluarga.

Pelaksanaan kegiatan ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal, kemampuan pendamping, dan kebutuhan penerima manfaat agar dampak program maksimal (Suharto, 2016).

4. Pendampingan dan Pembinaan Berkelanjutan

Pendampingan adalah inti dari implementasi program rehabilitasi sosial. Pendamping sosial memberikan bimbingan, supervisi, dan dukungan teknis kepada penerima manfaat agar mereka mampu mandiri. Pendampingan yang kontinu membantu masyarakat menghadapi kendala sehari-hari, meningkatkan keterampilan, dan

menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi dan sosial (Zastrow, 2017).

5. Tantangan dalam Implementasi

Implementasi program rehabilitasi sosial di tingkat desa sering menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- a) Keterbatasan jumlah pendamping sosial yang menyebabkan jangkauan program tidak merata.
- b) Kurangnya partisipasi masyarakat, karena sebagian warga kurang memahami tujuan program atau masih bergantung pada bantuan materiil.
- c) Koordinasi antar lembaga yang belum optimal, terutama antara pemerintah desa, Dinas Sosial, dan pihak terkait lainnya.
- d) Keterbatasan anggaran dan fasilitas, sehingga beberapa kegiatan program tidak dapat dijalankan secara menyeluruh.

Kondisi-kondisi ini mengakibatkan dampak program tidak selalu sesuai harapan, sehingga evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, 2024).

2. Masyarakat Kurang Mampu

a. Pengertian Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat kurang mampu merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial maupun ekonomi. Kondisi tersebut dapat ditandai dengan rendahnya kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, maupun kebutuhan lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi kemiskinan diukur melalui kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkaitan dengan pengeluaran atau konsumsi untuk kebutuhan makanan dan nonmakanan.

Istilah masyarakat kurang mampu dalam penelitian ini digunakan sebagai istilah yang lebih halus untuk menggambarkan masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam kondisi sosial ekonomi. Penggunaan istilah tersebut tidak mengubah substansi penelitian, tetapi digunakan untuk memberikan penyebutan yang lebih humanis terhadap kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

Menurut Suharto (2014), permasalahan kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan

keterbatasan akses terhadap sumber daya, pelayanan sosial, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi masyarakat kurang mampu perlu dipahami secara multidimensional.

Menurut Word Bank (2020), Kemiskinan bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan psikologis. Dari sisi ekonomi, kemiskinan terlihat dari rendahnya pendapatan dan daya beli; dari sisi sosial, kemiskinan tercermin dari terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial; sedangkan dari sisi psikologis, kemiskinan menimbulkan perasaan tidak berdaya, rendah diri, dan keterbatasan dalam merencanakan kehidupan masa depan.

Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa kemiskinan lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan, di mana masyarakat masih mengandalkan pekerjaan pertanian tradisional dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ini menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor struktural, ekonomi, sosial, dan geografis.

Suharto (2010) menambahkan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan kemampuan individu dan keluarga dalam

menjalankan fungsi sosialnya. Fungsi sosial ini mencakup kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, memanfaatkan fasilitas publik, dan meningkatkan kualitas hidup secara mandiri. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui program rehabilitasi sosial yang meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian masyarakat miskin

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang kompleks dan multidimensional. Penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan bantuan finansial semata, tetapi juga memerlukan intervensi sosial yang menyeluruh agar individu atau keluarga dapat mandiri, produktif, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.

b. Karakteristik Masyarakat Kurang Mampu

. Masyarakat kurang mampu memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari kondisi sosial dan ekonominya. Karakteristik tersebut antara lain rendahnya pendapatan, keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, keterbatasan kesempatan kerja, serta rendahnya kemampuan dalam mengembangkan sumber daya

ekonomi. Menurut BPS, pengukuran kondisi kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pendapatan, tetapi juga memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selain kondisi ekonomi, masyarakat kurang mampu juga dapat mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya dan pelayanan sosial. Menurut Suharto (2014), permasalahan kesejahteraan sosial dapat berkaitan dengan keterbatasan akses, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, program sosial perlu diarahkan tidak hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan dan akses masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia.

c. Faktor Penyebab Kondisi Sosial Ekonomi Rendah

Kemiskinan merupakan fenomena sosial-ekonomi yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi semata, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, sosial, dan struktural. Pemahaman tentang penyebab kemiskinan sangat penting untuk merancang strategi penanggulangan yang tepat, termasuk melalui program rehabilitasi sosial bagi masyarakat penerima bantuan sosial.

1. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi merupakan penyebab utama

kemiskinan yang paling sering dijumpai. Keterbatasan pendapatan, pekerjaan yang tidak tetap, pengangguran, dan rendahnya produktivitas masyarakat merupakan kondisi yang secara langsung menurunkan daya beli dan standar hidup keluarga (Todaro & Smith, 2015). Di desa pedesaan seperti Jeranglah Tinggi, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian dengan penghasilan tidak menentu akibat fluktuasi harga komoditas, musim tanam, atau perubahan iklim. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi faktor penting penyebab kemiskinan. Menurut Sen (1999), pendidikan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Individu yang minim pendidikan cenderung memiliki keterampilan kerja terbatas, sulit memperoleh pekerjaan layak, dan pendapatan yang rendah. Di desa Jeranglah Tinggi, masih terdapat sebagian anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya, jarak sekolah yang jauh, dan

rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Hal ini berkontribusi pada kemiskinan lintas-generasi.

3. Faktor Kesehatan

Kesehatan yang buruk merupakan penyebab kemiskinan yang sering terlupakan. Penyakit kronis, kurangnya akses layanan kesehatan, dan tingginya biaya pengobatan dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk bekerja produktif (Word Bank, 2020). Keluarga miskin sering kali memilih untuk menunda perawatan kesehatan atau mengandalkan pengobatan tradisional karena keterbatasan biaya, sehingga produktivitas dan pendapatan mereka menurun. Faktor ini menjadi lingkaran setan, di mana kemiskinan memperburuk kesehatan, dan kesehatan yang buruk memperdalam kemiskinan.

4. Faktor Sosial dan Keluarga

Kondisi sosial dan keluarga turut memengaruhi kemiskinan. Keluarga yang berstruktur tidak stabil, seperti keluarga tanpa kepala rumah tangga atau keluarga yang kehilangan pencari nafkah utama, lebih rentan terhadap kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu, norma sosial, diskriminasi, dan keterbatasan jaringan sosial juga dapat membatasi akses

masyarakat miskin terhadap peluang ekonomi, pendidikan, atau bantuan sosial. Di desa pedesaan, sistem gotong royong yang melemah dapat menambah kerentanan keluarga miskin.

5. Faktor Struktural dan Lingkungan

Kemiskinan seringkali muncul akibat faktor struktural, yaitu kelemahan sistem dan ketimpangan dalam distribusi sumber daya. Todaro dan Smith (2015) menekankan bahwa ketidakmerataan pembangunan, kurangnya akses terhadap infrastruktur, dan terbatasnya kesempatan ekonomi menciptakan kondisi kemiskinan yang sulit diatasi. Lingkungan fisik yang tidak mendukung, seperti daerah rawan bencana, tanah kurang subur, dan minimnya sarana transportasi, juga memperparah kemiskinan pedesaan.

6. Faktor Kelembagaan dan Kebijakan

Kebijakan pemerintah dan kelembagaan juga memengaruhi tingkat kemiskinan. Program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, koordinasi antarinstansi yang lemah, dan minimnya pendampingan kepada penerima manfaat dapat menyebabkan program tidak efektif (Suharto, 2016). Di Desa Jeranglah Tinggi, kendala kelembagaan seperti jumlah pendamping sosial yang terbatas dan

alokasi anggaran yang parsial menjadi faktor yang memperlambat keberhasilan program rehabilitasi sosial.

Secara keseluruhan, faktor penyebab kemiskinan bersifat multidimensional, saling terkait, dan memperkuat satu sama lain. Kondisi ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya melalui bantuan finansial semata, tetapi juga harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan rehabilitasi sosial. Pemahaman tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah desa, Dinas Sosial, dan lembaga terkait dalam merancang intervensi yang tepat di Desa Jeranglah Tinggi.

d. Dampak Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya menjadi masalah ekonomi semata, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak sosial, psikologis, dan pembangunan yang kompleks. Kondisi ini dapat memengaruhi individu, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan. Memahami dampak kemiskinan penting untuk merumuskan strategi penanggulangan yang efektif, termasuk melalui program rehabilitasi sosial.

1. Dampak terhadap Kesejahteraan Individu

Individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kekurangan ini berdampak langsung pada kualitas hidup dan kesehatan fisik maupun mental. Menurut Sen (1999), kemiskinan membatasi kemampuan individu untuk mengakses peluang, sehingga menimbulkan ketidakberdayaan dan rasa putus asa. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami malnutrisi, rendahnya pencapaian pendidikan, dan kesehatan yang terganggu, yang selanjutnya menghambat potensi mereka di masa depan.

2. Dampak terhadap Keluarga

Kemiskinan memengaruhi struktur dan dinamika keluarga. Keluarga miskin cenderung menghadapi stres ekonomi, yang dapat menimbulkan konflik rumah tangga dan menurunkan kualitas hubungan antar anggota keluarga (Badan Pusat Statistik, 2024). Selain itu, orang tua miskin sering harus bekerja ekstra keras atau meninggalkan anak di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga anak-anak kurang mendapatkan perhatian, pendidikan,

dan bimbingan yang optimal. Dampak ini memperkuat lingkaran kemiskinan antar-generasi.

3. Dampak terhadap Pendidikan

Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama rendahnya akses pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin lebih mungkin putus sekolah, memiliki tingkat partisipasi yang rendah, dan mengalami kesulitan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh pekerjaan layak di masa depan (Word Bank, 2020). Kondisi ini menimbulkan ketidaksetaraan kesempatan dan memperpanjang siklus kemiskinan.

4. Dampak terhadap Ekonomi dan Produktivitas

Kemiskinan juga berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat miskin memiliki keterbatasan modal, keterampilan, dan akses terhadap pasar, sehingga sulit untuk meningkatkan penghasilan atau memulai usaha produktif (Todaro & Smith, 2015). Kondisi ini menyebabkan rendahnya kontribusi sektor informal terhadap pembangunan ekonomi lokal dan memperlebar kesenjangan sosial.

5. Dampak terhadap Sosial dan Keterlibatan Masyarakat

Kemiskinan dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan kegiatan pembangunan. Orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses terbatas terhadap informasi, layanan publik, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial maupun politik (Suharto, 2016). Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi sosial.

6. Dampak terhadap Kesehatan Mental dan Psikologis

Kondisi ekonomi yang sulit memengaruhi kesehatan mental individu. Rasa cemas, depresi, dan stres kronis lebih tinggi pada masyarakat miskin dibandingkan dengan masyarakat yang lebih sejahtera (World Health Organization, 2019). Stres akibat kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dapat mengurangi motivasi dan produktivitas, serta memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan.

7. Dampak terhadap Pembangunan Masyarakat dan Negara

Kemiskinan memiliki dampak makro terhadap pembangunan daerah dan negara. Tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan rendahnya kualitas sumber

daya manusia, terbatasnya daya saing, dan meningkatnya beban pemerintah dalam penyediaan bantuan sosial (Badan Pusat Statistik, 2024). Di tingkat desa seperti Jeranglah Tinggi, kemiskinan menghambat pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan akses kesehatan, sehingga masyarakat sulit keluar dari kondisi miskin secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dampak kemiskinan bersifat multidimensional dan saling terkait antara aspek individu, keluarga, sosial, dan pembangunan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat komprehensif, melibatkan intervensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan sosial, serta program rehabilitasi sosial yang terintegrasi (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020). Pemahaman mengenai dampak kemiskinan ini menjadi dasar penting bagi perencanaan program kesejahteraan di Desa Jeranglah Tinggi, sehingga intervensi dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat penerima bantuan sosial.

a. Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kualitas kehidupan secara sosial dan

ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, penciptaan kesempatan kerja, dan pendampingan sosial. Menurut Suharto (2014), pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan karena menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kemampuan dan potensi untuk berkembang.

Dalam konteks masyarakat Desa Jeranglah Tinggi, peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan melalui pelaksanaan berbagai program sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kemandiriannya.

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi program rehabilitasi sosial merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai pihak dalam melaksanakan program untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan program dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori Edward III (1980) melalui empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, bentuk program rehabilitasi sosial dilihat melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan sosial, peningkatan keterampilan, dan penguatan kemandirian. Seluruh aspek tersebut menjadi dasar dalam menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi masyarakat kurang mampu di Desa Jeranglah Tinggi Kabupaten Bengkulu Selatan.

1. Upaya Pemerintah Melalui Kebijakan dan Program Sosial

Pemerintah memiliki peran sentral dalam menanggulangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Salah satu langkah strategis adalah pelaksanaan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), serta program

rehabilitasi sosial bagi masyarakat miskin (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020). Program-program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kapasitas ekonomi mereka.

2. Pemberdayaan Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan

Selain bantuan finansial, pemberdayaan ekonomi menjadi langkah penting dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha mikro, pemberian modal usaha, serta akses terhadap pasar menjadi upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat miskin (Todaro & Smith, 2015). Misalnya, pelatihan keterampilan kerajinan, pertanian modern, dan usaha kecil menengah (UKM) dapat membantu masyarakat meningkatkan penghasilan dan mengurangi risiko kemiskinan jangka panjang.

3. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Upaya mengatasi kemiskinan juga berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah dan lembaga terkait mendorong program beasiswa bagi anak miskin, layanan kesehatan gratis atau bersubsidi, serta penyediaan fasilitas pendidikan

yang memadai (Word Bank, 2020). Dengan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, masyarakat miskin memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kemampuan diri, memperoleh pekerjaan layak, dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

4. Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial menjadi pendekatan komprehensif dalam penanganan kemiskinan, karena tidak hanya fokus pada pemberian bantuan materi, tetapi juga pada pendampingan sosial, penguatan kapasitas, dan peningkatan fungsi sosial individu serta keluarga (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020). Program ini membantu masyarakat miskin mengembangkan keterampilan hidup, memperbaiki pola hidup, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Sosial

Kemiskinan tidak dapat diatasi hanya melalui bantuan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan menjadi faktor penting. Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha, koperasi, forum warga, dan kegiatan swadaya dapat mendorong kolaborasi dalam menciptakan peluang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan berbasis komunitas yang

menekankan keterlibatan masyarakat dalam merancang dan mengelola solusi atas permasalahan mereka sendiri (Suharto, 2016).

6. Pendekatan Holistik dan Kolaboratif

Pendekatan holistik dan kolaboratif sangat penting untuk keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, serta komunitas lokal harus bekerja sama dalam merancang program yang terintegrasi. Kolaborasi ini mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial, sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak bersifat parsial, tetapi memberikan dampak jangka panjang yang nyata (Sen, 1999).

7. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan. Akses terhadap informasi mengenai peluang usaha, pelatihan, dan bantuan sosial dapat membantu masyarakat miskin memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif. Digitalisasi pelayanan publik dan program bantuan sosial juga mempermudah distribusi bantuan, meningkatkan transparansi, serta mempercepat monitoring dan evaluasi program (Word Bank, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, upaya mengatasi kemiskinan memerlukan strategi yang menyeluruh, meliputi pemberian bantuan finansial, peningkatan kapasitas ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan diyakini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan sosial dan meningkatkan kemandirian mereka, termasuk di desa-desa seperti Jeranglah Tinggi, Kabupaten Bengkulu Selatan.

B. Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung kajian mengenai **“Implementasi Program Rehabilitasi Sosial bagi Masyarakat Penerima Bantuan Sosial di Desa Jeranglah Tinggi Kabupaten Bengkulu Selatan”**, diperlukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema, konteks, atau variabel. Penelitian terdahulu menjadi dasar penting untuk mengetahui sejauh mana program rehabilitasi sosial telah diteliti dan apa saja temuan yang dapat dijadikan rujukan. Melalui kajian penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta menemukan celah penelitian yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Relevan

NO	Peneliti & Tahun	Hasil Penelitian	Relevansi Dengan Penelitian
1	Adhi P. Yusuf dkk (2022) : Implementasi Kebijakan Program Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Jambu Luwuk Kabupaten Bogor	Program rehabilitasi sosial RTLH berjalan namun membutuhkan strategi sosialisasi dan pengawasan agar pelaksanaan lebih optimal	Studi implementasi program sosial bagi masyarakat miskin : relevan pada aspek pelaksanaan program rehabilitas sosial secara lapangan
2	Eliy Kuntjorowati (2022) : Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Pringsewu	Rehabilitas sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) memberikan dampak positif pada kondisi fisik rumah, aspek kesehatan, dan relasi sosial	Fokus pada program rehabilitasi sosial untuk masyarakat miskin dan dampaknya : dapat jadi perbandingan hasil program dengan konteks berbeda
3	Fahdina A. Sobri dkk (2025) : Implemtasi Program Asistensi Rehabilitasi	Implementasi program sosial Asistensi Rehabilitasi	Menunjukkan implementasi program rehabilitasi

	Sosial (Atensi) bagi Keluarga miskin melalui Warung makan di Bandung	Sosial (Atensi) bejalan cukup lancar namun terdapat perubahan kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan	sosial kepada keluarga miskin : relevan untuk perbandingan pendekatan implementasi program masyarakat miskin
4	Wily Ahmad (2023) : Peran Interfensi Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Bandung	Interfensi pekerja sosial penting dalam perencanaan dan monitoring, meskipun masih menghadapi tantangan sumber daya dan komunikasi	Relevan karena membahas implementasi program sosial berbasis rehabilitasi rumah dan peran pelaksana (Stakeholder)
5	Aulia Putri Novianty & Badrudin Kurniawan (2021) : Analisis Penerapan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Surabaya	Program RSDK berdampak positif namun partisipasi masyarakat rendah dan sumber daya terbatas	Relevan pada kajian implementasi rehabilitasi sosial yang mensyaratkan keterlibatan masyarakat dan sumber daya

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai implementasi program rehabilitasi sosial telah dilakukan dalam berbagai konteks, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, penanganan gelandangan dan pengemis, rehabilitasi penyandang disabilitas mental, anak terlantar,

korban penyalahgunaan NAPZA, serta peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, koordinasi, mekanisme pelaksanaan, serta dukungan dari kelompok sasaran.

Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi program rehabilitasi sosial bagi masyarakat kurang mampu di tingkat desa, khususnya di Desa Jeranglah Tinggi Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan bantuan yang diberikan, tetapi juga menganalisis proses implementasinya berdasarkan teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini mengkaji bentuk program dan dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan kemandirian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program rehabilitasi sosial pada tingkat desa serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

C. Kerangka Berpikir

Kemiskinan merupakan realitas sosial yang masih dihadapi oleh sebagian masyarakat Desa Jeranglah Tinggi.

Kondisi ini tercermin dari keterbatasan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, rendahnya pendapatan, serta terbatasnya kesempatan kerja dan usaha. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi fungsi sosial, kepercayaan diri, dan partisipasi sosial masyarakat miskin (Todaro & Smith, 2015).

Kementerian Sosial RI, 2023, Dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah menyelenggarakan program rehabilitasi sosial sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial. Program ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan sosial masyarakat miskin agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di lingkungan masyarakat.

Implementasi program rehabilitasi sosial merupakan proses penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata di tingkat lokal. Dalam konteks Desa Jeranglah Tinggi, implementasi program melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah desa, pendamping sosial, perangkat daerah, dan masyarakat miskin sebagai penerima manfaat (Agustino, 2016).

Dalam pendekatan kualitatif, keberhasilan implementasi program rehabilitasi sosial dipahami melalui

pengalaman, persepsi, dan praktik aktor-aktor yang terlibat. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi meliputi:

a. Komunikasi

Bagaimana informasi mengenai program disampaikan, dipahami, dan diterima oleh masyarakat miskin sangat memengaruhi partisipasi dan keberhasilan program. Penelitian kualitatif memandang implementasi tidak hanya sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh interaksi, pemahaman, dan interpretasi para pelaksana serta penerima program (Nugroho, 2017).

b. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial di desa (Edwards, 1980).

c. Sikap dan Komitmen Pelaksana

Sikap, kepedulian, dan komitmen pelaksana program, seperti pendamping sosial dan aparat desa, sangat menentukan kualitas implementasi program di lapangan (Agustino, 2016).

d. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat miskin sebagai penerima manfaat mencerminkan keberterimaan

program dan menjadi indikator penting keberhasilan implementasi secara social (Suharto, 2010).

Dalam perspektif kualitatif, implementasi program rehabilitasi sosial dipandang sebagai proses sosial yang dinamis. Proses ini dapat menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan kepentingan antar aktor, namun juga membuka ruang adaptasi dan inovasi local (John W. Creswell, 2014).

Implementasi program rehabilitasi sosial diharapkan memberikan perubahan sosial pada masyarakat miskin, seperti meningkatnya kemandirian, kemampuan beradaptasi sosial, rasa percaya diri, serta berkurangnya ketergantungan pada bantuan pemerintah. Dampak ini dipahami berdasarkan pengalaman subjektif dan narasi masyarakat penerima manfaat (Zastrow, 2017).

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir :



(Sumber : Penulis)